

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) UnAudited per 31 Desember 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.755.370.707,- (netto) atau mencapai 76,85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.284.022.000,-.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 59.273.393,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 59.273.393,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 555.000,- dan Rp 58.718.393-.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 1.801.477.922,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 1.801.477.922,-). sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 1.801.477.922,-)

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp104.825.608,- ditambah Defisit-LO sebesar (Rp1.801.477.922,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp 1.755.370.707,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp 58.718.393,-.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 UNIT ESELON 1 DITJEN BIMAS KRISTEN (05)  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-	#DIV/0!	-
<b>BELANJA</b>	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	1.474.032.000	951.074.490	64,52	1.181.333.743
Belanja Barang	B.4	809.990.000	804.296.217	99,30	669.125.880
Belanja Modal	B.5				
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.284.022.000</b>	<b>1.755.370.707</b>	<b>76,85</b>	<b>1.850.459.623</b>

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 UNIT ESELON 1 DITJEN BIMAS KRISTEN (05)  
 NERACA  
 PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

URAIAN	CATATAN	2018	2017
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		
Piutang Bukan Pajak	C.4		
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7		
Belanja Dibayar di Muka	C.8		
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9		
Persediaan	C.10	-	333.000
Jumlah Aset Lancar		-	333.000
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13		
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14		
Peralatan dan Mesin	C.15	351.295.000	351.295.000
Gedung dan Bangunan	C.16		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17		
Aset Tetap Lainnya	C.18		
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(292.021.607)	(245.618.392)
Jumlah Aset Tetap		59.273.393	105.676.608
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21		
Aset Lain-Lain	C.22		
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23		
Jumlah Aset Lainnya			
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>59.273.393</b>	<b>106.009.608</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	555.000	1.184.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.26		
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		555.000	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>555.000</b>	<b>1.184.000</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	58.718.393	104.825.608
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>58.718.393</b>	<b>104.825.608</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>59.273.393</b>	<b>106.009.608</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 UNIT ESELON 1 DITJEN BIMAS KRISTEN (05)  
 LAPORAN OPERASIONAL**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2018	2017
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	950.445.490	1.182.517.743
Beban Persediaan	D.3	1.333.000	2.789.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	538.839.099	251.470.100
Beban Pemeliharaan	D.5	32.497.165	31.661.900
Beban Perjalanan	D.6	231.959.953	283.551.880
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		100.000.000
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	46.403.215	55.560.325
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.801.477.922</b>	<b>1.907.550.948</b>
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.801.477.922)	(1.907.550.948)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.801.477.922)	(1.907.550.948)
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNB			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(1.801.477.922)</b>	<b>(1.907.550.948)</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 UNIT ESELON 1 DITJEN BIMAS KRISTEN (05)  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2018	2017
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	104.825.608	161.916.933
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.801.477.922)	<b>(1.907.550.948)</b>
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4		
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5		
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6		
JUMLAH		<b>(1.696.652.314)</b>	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.755.370.707	1.850.459.623
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>58.718.393</b>	<b>104.825.608</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

#### Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Unit Eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05)

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen) Kementerian Agama yang kita kenal sekarang ini, sebenarnya telah melewati sejarah panjang pembentukannya sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam mengisi kemerdekaan yang diyakini sebagai anugerah Tuhan, sangat dibutuhkan pembinaan kehidupan berbangsa yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya dibentuklah Kementerian Agama RI melalui Penetapan Pemerintah No. 1 S.D. tanggal 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama pertamanya Bapak H. Mohammad Rasjidi, sebagai hasil musyawarah Kabinet Sjahrir yang memutuskan untuk membentuk sebuah Kementerian yang secara khusus mengurus soal agama.

Berdirinya Kementerian Agama dalam jajaran pemerintahan Republik Indonesia juga merupakan penegasan bahwa Negara Republik Indonesia tidak menjadi negara sekuler dan bukan juga negara teokratis. Tugas-tugas yang berhubungan dengan keagamaan yang tadinya diurus oleh beberapa Kementerian, kini diurus oleh Kementerian Agama RI berdasarkan Penetapan Pemerintahan No. 5 S.D tanggal 25 Maret 1946.



Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) berkomitmen dengan visi:

"Terwujudnya Masyarakat Kristen yang Beriman, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Dalam Rangka Menuju Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) tahun 31 Desember 2018 melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Kristen;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama;
3. Memantapkan Kualitas Kerukunan Internal dan Ekstern Umat Kristen;
4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Keagamaan Berciri Khas Kristen, Pendidikan Agama Kristen pada Satuan Pendidikan Umum;
5. Mewujudkan Tata Kelola di Lingkungan Bimas Kristen yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

**A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 UnAudited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) tahun 2018. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) UnAudited per 31 Desember 2018 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) tahun 2018 yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) 31 Desember 2018 adalah 4 (empat) satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

*Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W*

No	Kode Satker	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	418 547	Kankemenag Kota Pangkalpinang	-	1	-	-	1
2	6486 60	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	1	-	-	1
3	6640 03	Kankemenag Kab. Bangka Barat	-	1	-	-	1
4	6640 17	Kankemenag Kab. Bangka Tengah	-	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>			<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>

*Basis*

**A.3. Basis Akuntansi**

*Akuntansi*

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) UnAudited per 31 Desember 2018

menerapkan

basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian

Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) UnAudited per 31 Desember 2018 dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

*Pendapatan  
-LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan  
-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

##### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

##### **(5) Aset**

#### *Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### *Aset Lancar*

##### **a. Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%



Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan

mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai
- dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam
  - d. kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
 Jangka  
 Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
 Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa

Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam

- Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

*Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) 31 Desember 2018 telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Dalam ini hanya revisi di dalam akun pegawai saja dengan total anggaran belanja pegawai sama. Tidak ada perubahan anggaran awal dan setelah revisi, dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Lain-lain		
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	1.474.032.000	1.474.032.000
Belanja Barang	809.990.000	809.990.000
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.284.022.000</b>	<b>2.284.022.000</b>

*Realisasi  
 Pendapatan  
 Rp 0*

### B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) 31 Desember 2018 berasal dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.



Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagaiberikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2018*

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	
Pendapatan Lain-lain	-	-	
<b>Jumlah</b>	-	-	

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0% dibandingkan realisasi TA 2017. Hal ini disebabkan oleh tidak ada peningkatan pelayanan jasa akuntansi sehubungan dengan kewajiban penerapan akuntansi berbasis akrual di tahun 2017.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	
Pendapatan Lain-lain	-	-	
<b>Jumlah</b>	-	-	

*Realisasi*

*Belanja*

*Negara*

*Rp1.755.370.707,*

*- (bruto)*

**B.2. BELANJA**

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp1.755.370.707,- atau 76,85 % dari anggaran belanja sebesar Rp 2.284.022.000,- .Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 tersaji sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember  
 2018*

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.474.032.000	951.074.490	64,52
Belanja Barang	809.990.000	804.296.217	99,30
Belanja Modal			
Belanja Bantuan Sosial			
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>2.284.022.000</b>	<b>1.755.370.707</b>	76,85
Pengembalian Belanja	-		
<b>Total Belanja</b>	<b>2.284.022.000</b>	<b>1.755.370.707</b>	76,85

Realisasi Belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar 5,14 % dibandingkan realisasi belanja pada TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. penurunan pada belanja pegawai
2. peningkatan belanja barang pada TA 2018
3. Tidak ada Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan social

*Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2018  
 dan 2017*

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	951.074.490	1.181.333.743	(19,49)
Belanja Barang	804.296.217	669.125.880	20,20
Belanja Modal			
Belanja Bantuan Sosial			
<b>Jumlah</b>	<b>1.755.370.707</b>	<b>1.850.459.623</b>	<b>(5,14)</b>

*Belanja*

**B.3 Belanja Pegawai**

*Pegawai*

*Rp951.074.490,-  
 (netto)*

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 951.074.490,- dan Rp1.181.333.743,- . Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar 18,66 persen dari realisasi belanja TA 2017. Hal ini disebabkan tidak ada lagi utang belanja pegawai non PNS yang masih harus dibayar tahun 2017.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	665.055.700	661.315.083	0,57
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	150.000.000	393.000.000	(61,83)
Belanja Honorarium			
Belanja Lembur			
Belanja Tunjangan Khusus	146.018.790	128.381.820	13,74
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>961.074.490</b>	<b>1.182.696.903</b>	<b>(18,74)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(162.800)	(1.363.160)	(88,06)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>960.911.690</b>	<b>1.181.333.743</b>	<b>(18,66)</b>

*Belanja*

**B.4 Belanja Barang**

*Barang*

*Rp804.296.217,-  
 (netto)*

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 804.296.217,- dan Rp 669.125.880,-. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 20,45 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Belanja barang Non Operasional mengalami peningkatan yang cukup besar 444,28%

*Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	119,639,099	113,161,100	5.72
Belanja Barang Non Operasional	377,700,000	69,395,000	444.28
Belanja Barang Persediaan	1,000,000	2,442,000	(59.05)
Belanja Jasa	41,500,000	68,914,000	(39.78)
Belanja Pemeliharaan	32,497,165	31,661,900	2.64
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	231,959,953	283,551,880	(18.19)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.		100,000,000	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>804,296,217</b>	<b>669,125,880</b>	<b>20.20</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>804,296,217</b>	<b>669,125,880</b>	<b>20.20</b>

*Belanja Modal*

**B.5 Belanja Modal**

*Rp 0*

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0 % dibandingkan TA 2017 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan

bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Modal Lainnya			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2017. *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah			
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah			
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah			
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 adalah sebesar Rp 0,- mengalami kenaikan sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan TA 2017 yaitu sebesar Rp 0,-.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal*

*31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>		
Pengembalian	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi belanja gedung dan bangunan TA 2017 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>			
Pengembalian Belanja Modal			
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan tidak ada penambahan jaringan teknologi informasi di semua satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam rangka mendukung rencana strategis.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan			
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>			
Pengembalian Belanja Modal			
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Hal ini disebabkan tidak ada pengadaan *software* di seluruh satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di  
 Bendahara  
 Pengeluaran  
 Rp.0,-*

#### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelolakan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di  
 Bendahara  
 Penerimaan  
 Rp 0*

#### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2018 dan 2017*

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang Tunai		
Rekening Bank		
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 0* **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 0. dan Rp 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 dan 2017*

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya dari Hibah		
<b>Jumlah</b>	-	-

*Piutang PNBP Rp 0* **C.4 Piutang PNBP**

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP TA 2018 dan 2017*

Uraian	TH 2018	TH 2017
Piutang PNBP		
Piutang Lainnya		
<b>Jumlah</b>	-	-

*Bagian Lancar* **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
TP/TGR Rp 0 Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

*Bagian Lancar* **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**  
*TPA Rp 0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan,

*Penyisihan* **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar**

*Piutang Tak  
Tertagih -  
Piutang  
Lancar Rp 0*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan piutang takterttagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidakterttagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan.

*Belanja  
 Dibayar di  
 Muka Rp 0*

**C.8 Beban Dibayar di Muka**

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2018 dan 2017*

Jenis	TH 2018	TH 2017
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
<b>Jumlah</b>	-	-

*Pendapatan  
 yang Masih  
 Harus  
 Diterima Rp 0*

**C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2018 dan 2017*

Jenis	TH 2017	TH 2016
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		
<b>Jumlah</b>	-	-

*Persediaan*

**C.10 Persediaan**

*Rp.0,-*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp 333.000,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017*

<b>Persediaan</b>	<b>TH 2018</b>	<b>TH 2017</b>
Barang Konsumsi	-	333.000
Barang untuk Pemeliharaan		
Suku Cadang		
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Persediaan Lainnya		
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>333.000</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan*

**C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*TP/TGR Rp 0*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR ) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian TagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) TA 2018 dan 2017*

No	Debitur per Satker	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Satker kanwil babel		
2	Kankemenag kota pangkalpinang		
3	kankemenag kab bangka barat		
4	kankemenag kab bangka tengah		
<b>Jumlah</b>			

*Tagihan  
 Penjualan  
 Angsuran  
 Rp 0*

### **C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian TPA untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

No	Debitur	TH 2018	TH 2017
1	satker kanwil babel		
2	kankemenag kota pangkalpinang		
3	kankem nag kab bangka barat		
4	kankemenag kab bangka tengah		
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan  
 Piutang Tak  
 Tertagih –  
 Piutang  
 Jangka  
 Panjang Rp 0*

### **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2018*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar		0.50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

*Tanah Rp 0*

**C.14 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi		
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

*Peralatan dan* **C.15 Peralatan dan Mesin**

*Mesin*

*Rp351.295.000,-*

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp351.295.000,- dan Rp351.295.000,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>Rp</b>	<b>351.295.000</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian		
Hibah		
Transfer Masuk		
Reklasifikasi Masuk		
Koreksi tambah		
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan		
Penghapusan		
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>Rp</b>	<b>351.295.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	(292.021.607)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>Rp</b>	<b>59.273.393</b>

Mutasi tambah:

- a. Pembelian komputer unit senilai Rp 0.
- b. Pengadaan alat angkutan darat bermotor senilai Rp 0.
- c. Hibah sebesar Rp 0 merupakan hibah alat kantor dan rumah tangga yang pencatatannya berdasarkan nilai pada berita acara serah terima (BAST).
- d. Transfer masuk berupa komputer unit dan peralatan komputer dari Kantor Pusat BAPK sebesar Rp 0.
- e. Reklasifikasi masuk berasal dari pengaktifan kembali alat angkutan darat bermotor yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp 0.
- f. Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan total Rp 0.

Mutasi kurang:

- a. Penghentian alat studio, komunikasi, dan pemancar dari penggunaannya sebesar Rp 0 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain.
- b. Penghapusan sebesar Rp 0 berupa alat angkutan darat bermotor.

*Gedung dan  
 Bangunan Rp 0*

### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	-

Mutasi tambah:

- a. Pembangunan gedung baru serta penambahan ruang kelas senilai Rp 0.
- b. Koreksi kurang sebesar Rp 0 yang merupakan koreksi pencatatan dari tahun anggaran yang lalu.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi  
 dan Jaringan  
 Rp 0*

### **C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan



per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	-

*Aset Tetap*

*Lainnya Rp 0*

**C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 0 dan Rp 0.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	-

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi dalam Pengerjaan Rp 0*

**C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0. dan Rp 0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan

tanggal neraca. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan*

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1					
2					
<b>Jumlah</b>		-		-	

*Akumulasi  
 Penyusutan  
 Aset Tetap (Rp  
 292.021.607,-)*

**C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing (Rp 292.021.607,-) dan (Rp 245.618.392,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 351.295.000	Rp (292.021.607)	Rp 59.273.393
2	Gedung dan Bangunan			
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
4	Aset Tetap Lainnya			
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				

*Aset Tak  
 Berwujud Rp 0*

**C.21 Aset Tak Berwujud**

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah

sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud*

Uraian	Nilai
Software Komputer	0
ATB Lainnya	0
	0

Mutasi:

<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
pembelian	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Amortisasi	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

•

*Aset Lain-Lain*  
*Rp 0*

**C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) 31 Desember 2018 serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
- reklasifikasi dari aset tetap		
<b>Mutasi kurang:</b>		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan		
- penghapusan BMN		
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>		
Akumulasi Penyusutan		
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>		

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi dari aset tetap berupa penghentian penggunaan alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp 0 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain.
- b. Pengurangan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali alat angkutan yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp 0.
- c. Pengurangan berupa penghapusan sebesar Rp 0. merupakan penghapusan kendaraan bermotor melalui penjualan.

*Akumulasi  
 Penyusutan  
 dan  
 Amortisasi  
 Aset Lainnya  
 Rp 0*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Software	0	0	0
ATB Lainnya	0	0	0
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka  
dari KPPN  
Rp.0,-*

#### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN*

No	Uraian	Tahun 2018
1	satker kanwil babel	
2	kankemenag kota pangkalpinang	
3	kankemenag kab. Bangka barat	
4	kankemenag kab bangka tengah	
<b>Jumlah</b>		

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp 555.000,-*

#### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 555.000,- dan Rp1.184.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Utang Kepada pihak ketiga TA 2018 dan TA 2017*

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Pendapatan  
 Diterima di  
 Muka Rp 0*

**C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

*Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta		
Instansi Pemerintah Lainnya		
Badan Lainnya		
<b>Total</b>	<b>-</b>	

*Ekuitas  
 Rp58.718.393,-*

**C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 58.718.393,- dan Rp104.825.608,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Pendapatan  
 PNBP Rp 0*

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2018 dan 2017*

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Lain-lain			
<b>Jumlah</b>	-	-	

Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa, dan perjalanan dinas yang berasal dari transaksi tahun 2017 jika ada.

*Beban  
 Pegawai  
 Rp950.445.490,-*

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 950.445.490,- dan Rp 1.181.814.743,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

*Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	321.297.890	314.941.982	2
Beban Tunjangan-Tunjangan	430.393.810	817.939.921	(47)
Uang makan	52.897.800	50.296.000	5
tunjangan khusus	146.018.790	-	#DIV/0!
pengembalian beban pegawai	(162.800)	(1.363.160)	(88)
<b>Jumlah</b>	<b>950.445.490</b>	<b>1.181.814.743</b>	(20)

*Beban*

**D.3 Beban Persediaan**

*Persediaan*

*Rp1.333.000,-*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.333.000,- dan Rp 2.789.000,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.333.000	2.789.000	(52,21)
beban persediaan pita cukai materai ledges			
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>1.333.000</b>	<b>2.789.000</b>	(52,21)

*Beban Barang*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

*dan Jasa Rp*

*538.839.099,-*

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp538.839.099,- dan Rp251.470.100,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban



yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
beban Keperluan perkantoran	8.999.099	7.321.100	22,92
Beban Honor operasional satuan kerja	50.640.000	50.640.000	0,00
Beban barang operasional lainnya	60.000.000	55.200.000	8,70
Beban bahan	18.550.000	17.195.000	7,88
Beban Honor output kegiatan	9.150.000	12.200.000	-25,00
beban barang pemberian bantuan operasional dalam	350.000.000	40.000.000	775,00
beban jasa profesi	41.500.000	66.950.000	-38,01
beban sewa	0	1.964.000	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>538.839.099</b>	<b>251.470.100</b>	<b>114,28</b>

*Beban  
 Pemeliharaan  
 Rp32.497.165,-*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 32.497.165,- dan Rp 31.661.900,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	Th 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan mesin	32.497.165	29.586.900	9,84
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	0	2.075.000	
Beban Bahan bakar minyak dan pelumas (BMP)			
beban persediaan suku cadang			
<b>Jumlah</b>	<b>32.497.165</b>	<b>31.661.900</b>	<b>2,64</b>

*Beban*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

*Perjalanan*

*Dinas*

*Rp231.959.953*

*,-*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 231.959.953,- dan Rp283.551.880,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	102.309.703	93.182.240	9,80
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84.453.000	154.814.640	-45,45
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	45.197.250	35.555.000	27,12
<b>Jumlah</b>	<b>231.959.953</b>	<b>283.551.880</b>	<b>-18,19</b>

*Beban Barang*

*untuk*

*Diserahkan*

*kepada*

*Masyarakat*

*Rp 0,-*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) 31 Desember 2018 untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember

2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0		
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Beban Bantuan Sosial Rp 0*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial			
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Beban*

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

*Penyusutan  
 dan Amortisasi  
 Rp46.403.215,-*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 46.403.215,- dan Rp 55.560.325,-.

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
 31 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.403.215	55.560.325	(16)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan			
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>46.403.215</b>	<b>55.560.325</b>	(16)
Beban Amortisasi Software		-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya			
Beban Penyusutan Aset Lain-lain			
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>		
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>46.403.215</b>	<b>55.560.325</b>	(16)

*Beban*

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

*Penyisihan  
 Piutang Tak  
 Tertagih Rp 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31  
 Desember 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar			
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang			
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Surplus/Defisit  
 dari Kegiatan  
 Non Operasional  
 (Rp 0-)*

**D.11 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2018  
 dan 2017*

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut			
Penjualan Alat Kantor			
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan			
Jumlah beban pada LO	0	-	
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00

*\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Defisit setelah  
 Pos Luar Biasa  
 (Rp1.801.477.9  
 22,)*

**D.12 Defisit Setelah Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN  
PERUBAHAN EKUITAS**

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp104.825.608,-</i>	<b>E.1 Ekuitas Awal</b> Nilai ekuitas (kekayaan bersih) pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp104.825.608,- dan Rp161.916.933,-.
<i>Defisit LO</i> <i>(Rp1.801.477.922,-)</i>	<b>E.2 Surplus (Defisit) LO</b> Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah defisit sebesar (Rp1.801.477.922,-) dan (Rp1.907.550.948,-). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</i> <i>Rp 0</i>	<b>E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</b> Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 0.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i> <i>Rp 0</i>	<b>E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset</b> Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai* **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

*Persediaan Rp 0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	
2. Suku Cadang	
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	
4. Barang Persediaan Lainnya	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Selisih* **E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

*Revaluasi Aset Tetap Rp 0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Selisih revaluasi aset tetap berasal dari penilaian ulang atas tanah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung unit eselon 1 Ditjen Bimas Kristen (05) 31 Desember 2018.

*Koreksi Nilai* **E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

*Aset Tetap Non Revaluasi Rp 0*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang

bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Lain-lainRp 0*

**E.3.6 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Transaksi Antar EntitasRp1.755.370.707,-*

**E.4Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.755.370.707,- dan Rp 1.850.459.623,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Ditagihkan ke entitas lain merupakan



Tagihan SP2D satker – satker kepada BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.755.370.707
Transfer Masuk	
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.755.370.707</b>

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp 0 sedangkan DKEL sebesar Rp1.755.370.707,-

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		
3	Persediaan		
	<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0 yang merupakan transfer

Persediaan

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0 dari total Rp 0 yang diterima sepanjang tahun 2017. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp 0.

Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			
2			
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

*Ekuitas Akhir*  
*Rp58.718.393,-*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp58.718.393,- dan Rp104.825.608,-.

**F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH  
TANGGAL NERACA**

Kejadian setelah tanggal 31 Desember 2018 bahwa ada belanja pegawai yang masih harus dibayar sebagai yaitu belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp 555.000,- pada satker Kankemenag Bangka Tengah. Pada anggaran tahun 2019 sudah disiapkan untuk pembayarannya.